



Strategi *Reinventing Government* dalam Pengembangan Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang

Ratika Yana Wardani¹, Rudi Subiyakto^{2*}, Okparizan³

^{1,2,3}Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jl. Raya Dompok - Tanjungpinang 29111.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 26/06/2024

Revised 08/08/2024

Accepted 07/11/2024

Abstract

The tourism sector plays a crucial role in economic growth by increasing the country's foreign exchange and creating jobs. Indonesia, with more than 17,000 islands rich in natural and cultural beauty, has great tourism potential. Riau Islands Province, especially Tanjungpinang City, has significant natural and cultural tourism potential. This research aims to analyze the application of the concept of reinventing government in developing Tanjungpinang tourism by increasing management efficiency and innovation in the tourism bureaucracy. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that the application of the principles of "Reinventing Government" such as catalyst government, community-owned government, competitive government, mission-oriented government, results-oriented government, customer-oriented government, entrepreneurial government, anticipatory government, and decentralized government, has had a positive impact in developing tourism in Tanjungpinang. The conclusion shows that collaboration between government, society and the private sector is the key to success, and improving service quality and innovation are the main factors in attracting tourists and increasing regional income. These results indicate that the reinventing government approach can be an effective model for tourism development in other cities.

Keywords: Strategy, Reinventing Government, Tourism Development

Abstrak

Sektor pariwisata memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja. Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang kaya akan keindahan alam dan budaya, memiliki potensi pariwisata yang besar. Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang, memiliki potensi wisata alam dan budaya yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *reinventing government* dalam mengembangkan pariwisata Tanjungpinang dengan meningkatkan efisiensi manajemen dan inovasi dalam birokrasi pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip "Reinventing Government" seperti pemerintah katalis, pemerintah milik masyarakat, pemerintah kompetitif, pemerintah berorientasi misi, pemerintah berorientasi pada hasil, pemerintah berorientasi pelanggan, pemerintahan wirausaha, pemerintah antisipatif, dan pemerintah desentralisasi, telah membawa dampak positif dalam pengembangan pariwisata di Tanjungpinang. Kesimpulan menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci keberhasilan, serta peningkatan kualitas layanan dan inovasi menjadi faktor utama dalam menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah. Hasil ini



mengindikasikan bahwa pendekatan *reinventing government* dapat menjadi model yang efektif untuk pengembangan pariwisata di kota-kota lain.

Kata Kunci: Strategi, *Reinventing Government*, Pengembangan Pariwisata

*Penulis Korespondensi

E-mail : rudisubiyaktodap2015@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata saat ini termasuk salah satu hal yang diperhitungkan dalam menambah devisa negara. Pariwisata memiliki prospek nilai yang sangat besar di masa depan. Pariwisata dianggap dapat meningkatkan ekonomi lokal dan mempromosikan budaya dan keindahan alam setempat. Pariwisata merupakan investasi yang penting bagi sebuah negara karena pariwisata merupakan sumber pendapatan negara yang dapat terus diperbarui melalui renovasi dan perawatan rutin.

Dengan peran utamanya dalam menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan devisa, pariwisata dapat dikatakan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (S et al., 2023). Destinasi pariwisata memiliki letak area wilayah yang mempunyai daya minat untuk dikunjungi, akses yang dapat dijangkau, peran masyarakat yang berhubungan baik sehingga dapat meningkatkan kunjungan orang untuk berwisata (Lestari, 2023).

Indonesia memiliki banyak potensi pariwisata karena budaya dan alamnya yang beragam. Negara ini memiliki lebih dari 17.000 pulau yang memberikan berbagai keindahan alam yang luar biasa, seperti pantai, pegunungan, hutan, danau, sungai, dan beragam keanekaragaman hayati. Selain itu, daya tariknya adalah kekayaan budayanya yang kaya, yang mencakup seni, tari, musik, arsitektur, dan kuliner. Menurut Septyana, banyak kunjungan wisatawan yang masuk ke Indonesia untuk berlibur dan menikmati keindahan alam dan

budaya yang ada di Indonesia (Wariski & Jumiati, 2023).

Seperti yang diketahui, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 memberikan penjelasan tentang industri pariwisata. Pasal 6 menyatakan bahwa pembangunan industri pariwisata didasarkan pada prinsip yang disebutkan dalam pasal 2 dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata (M et al., 2021). Menurut Murphy, pariwisata terdiri dari berbagai komponen (wisatawan, lokasi wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang berasal dari perjalanan tidak permanen (Kagungan, 2019). Disebut juga sebagai multi dimensional, pariwisata membutuhkan dukungan dari berbagai perspektif, pemahaman, dan pendapat dari berbagai lintas sektor. Baik sektor non-pemerintah maupun pemerintah menangani banyak hal, termasuk sektor, instansi, dan disiplin. karena koordinasi adalah kebutuhan utama pariwisata (Isdarmanto, 2016).

Untuk meningkatkan potensi pariwisata Indonesia, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan perhatian khusus kepada industri ini (Idris et al., 2019). Kepulauan Riau adalah kawasan kepulauan di Pulau Sumatra yang terdiri dari 2.408 pulau. Memiliki wilayah perairan seluas 96% dan hanya 4% daratan, Kepulauan Riau memiliki banyak potensi wisata, terutama wisata kepulauan dan bahari. Kepulauan Riau memiliki

potensi untuk menarik wisatawan dari luar negeri karena terletak di antara negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Kepulauan Riau memiliki tujuh kabupaten dan kota. Mereka adalah Tanjungpinang, Batam, Bintan, Karimun, Natuna, Anambas, dan Lingga. Untuk destinasi wisata, setiap kabupaten dan kota memiliki ciri khas tertentu, seperti wisata alam, wisata bahari, wisata religius, wisata belanja, wisata kuliner, dan wisata sejarah. Propinsi Kepulauan Riau menerima 1.529.598 kunjungan wisatawan asing dari Januari hingga Desember 2023, menurut laporan dari BPS (Badan Pusat Statistik). Setiap negara harus mengembangkan pariwisata karena delapan alasan utama yang mengarah ke luar perkembangan ekonominya. Salah satunya adalah menjadi inisiator perekonomian dan menghasilkan pendapatan bagi perekonomian negara. Selain itu, sektor pariwisata telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi propinsi sekitarnya melalui permintaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan wisatawan yang tiba di sana (Wibowo, 2019). Menurut Yoeti, pengembangan kawasan pariwisata meliputi: (1) produk berupa wujud fisik atau produk wisata (2) memprediksi jumlah kunjungan, penetapan harga, dan melihat potensi wisata yang akan bersaing (Muhammad et al., 2021). Menurut Sugiana, elemen penunjang wisata adalah elemen kepariwisataan yang harus ada di destinasi wisata, yang terdiri dari 4A: Attraction, Amenities, Ancillary dan Accesibility (Mersyana & Hadilinatih, 2023). Pemerintah masih berfokus pada pembangunan beberapa sektor, salah satunya pariwisata berkelanjutan, yang dianggap memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi negara (Vani et al., 2020).

Dalam buku *Mewirausahakan Birokrasi* tahun 2000, David Osborn dan Ted Gaebler menyatakan bahwa transformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik merupakan bagian dari *reinventing government*. Ini dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pegawai dalam inovasi di era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah harus mandiri. transformasi dengan mengubah sistem menjadi berbasis wirausaha daripada birokrasi. Dengan demikian, peneliti mencoba menggunakan gagasan *reinventing government* untuk mengembangkan pariwisata. Hal ini dikarenakan pemerintah yang mengembangkan pariwisata harus memahami dinamika pasar yang diinginkan pengunjung. Konsep utama adalah bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan birokrasi, khususnya di bidang pariwisata, dengan cara yang efektif dan efisien.

Konsep *reinventing government* berarti bahwa departemen pariwisata harus memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi untuk mengembangkan pariwisata. Salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi manajemen pemerintah atau memasukkan manajemen swasta ke dalam pemerintahan. Rekonstruksi pemerintahan mengikuti sepuluh prinsip: pemerintahan katalis, pemerintahan milik masyarakat, pemerintahan kompetitif, pemerintahan yang digerakkan oleh misi, pemerintahan yang berorientasi pada hasil, dan pemerintahan yang berfokus pada pelanggan.

Menurut uraian diatas diharapkan dapat membuat perubahan positif pada pariwisata kota Tanjungpinang, maka dari itu penelitian mengambil judul "Strategi *Reinventing Government* dalam

Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang”.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh dan eksplisit, dengan menggunakan berbagai metode alamiah dalam konteks alami (Sazali, 2020). Dalam menggunakan sumber data langkah pertama yaitu, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau pengamatan (Abdussamad, 2021; Maulana, 2021). Diharapkan nantinya dengan menentukan jenis penelitian dapat menggali bentuk pengembangan pariwisata sektor Bahari Kota Tanjungpinang pada Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam strategi *reinventing government*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota dari Kepulauan Riau terletak pada posisi strategis yaitu di pesisir barat daya Pulau Bintan. Kota ini menjadi gerbang pintu masuk untuk menjelajahi sejumlah pariwisata di Kepulauan Riau. Sebagai Kota Budaya dan Kota Tua, Tanjungpinang dipenuhi dengan keberagaman komunitas etnis sehingga dengan mudah di temui masjid, vihara dan gereja berjejer di jalan, hidup dengan harmonis.

Dalam melengkapi sarana prasarana objek wisata maka fasilitas pendukung dapat di dapati dengan mudah, seperti penginapan, rumah makan dan hotel. Beberapa objek wisata yang ramai dikunjungi seperti objek wisata sejarah dan budaya, ditambah pesona beberapa pantai membuat Tanjungpinang minat

dikunjungi. Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang potensi pariwisata Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan dari sudut pandang *reinventing government*, yang dianggap sesuai dengan paradigma pemerintah untuk mengatur pengembangan pariwisata. Konsep *reinventing government* terdiri dari sepuluh prinsip, yang akan dibahas lebih lanjut.

Pemerintah Katalis

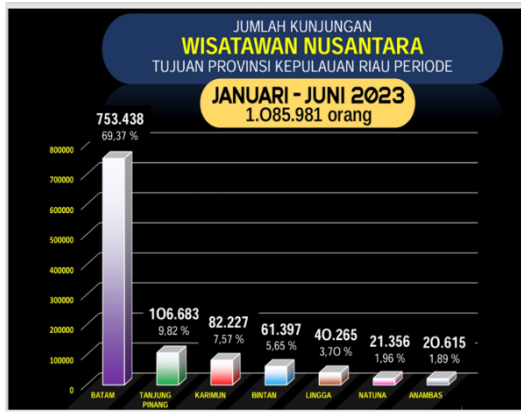
Implementasi prinsip pemerintahan katalis di Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa dengan memisahkan fungsi pengarah dan pelaksanaan, serta melibatkan sektor swasta dan masyarakat, pengembangan pariwisata dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kerjasama yang erat antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program pengembangan pariwisata, menjadikan pemerintah lebih berperan sebagai pengarah dan pengawas, sementara pelaksanaan diserahkan kepada pihak yang lebih kompeten dalam hal kreativitas dan inovasi.

Pemerintah Milik Masyarakat

Implementasi prinsip "Empowering Rather than Serving" di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan komitmen mereka dalam pengembangan pariwisata. Pembentukan Pokdarwis dan keterlibatan UMKM menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan peran masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, berperan sebagai fasilitator dan pembina, memberikan wewenang kepada masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan

program. Pemberdayaan ini menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata di Tanjungpinang.

Pemerintah Kompetitif



Gambar 1. Data Wisatawan Nusantara

Sumber: BPS Kepulauan Riau 2023

Implementasi prinsip pemerintah kompetitif di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa meskipun kota ini memiliki keterbatasan dalam potensi pariwisata, persaingan dengan kota lain dapat memacu Dinas Pariwisata untuk bekerja lebih keras dan kreatif. Fokus pada pengembangan pariwisata berbasis budaya dan revitalisasi tempat-tempat wisata sesuai dengan ciri khas budaya Melayu adalah langkah strategis yang dapat meningkatkan daya tarik Tanjungpinang. Selain itu, peningkatan pelayanan dan kinerja pegawai merupakan kunci untuk mencapai pemerintahan yang kompetitif, yang pada akhirnya akan menguntungkan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Berorientasi Misi

Transformasi organisasi dari yang digerakkan oleh peraturan menjadi digerakkan oleh misi memungkinkan pemerintah untuk

memiliki arah dan tujuan yang jelas, yang diwujudkan melalui program dan kegiatan yang sesuai. Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang telah menunjukkan bahwa dengan mengikuti visi dan misi yang jelas serta memastikan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD dan RPD, mereka dapat memperoleh hasil dan target yang sudah ditentukan terlebih dahulu. mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara peraturan dan misi organisasi untuk mencapai pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Berorientasi Pada Hasil

Pentingnya pemerintah berorientasi pada hasil dengan menekankan pada pencapaian dan dampak dari setiap program yang dilaksanakan. Penggunaan alat pengukuran kinerja seperti Indikator Kerja Utama dan Penetapan Kinerja memungkinkan Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang untuk mengevaluasi dan menyesuaikan program-programnya agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Data peningkatan kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan, sehingga memperkuat argumen bahwa orientasi pada hasil lebih penting daripada sekedar mengukur input atau sumber daya yang digunakan.

Pemerintah Berorientasi Pelanggan

Pendekatan pemerintah yang berorientasi pada pelanggan menekankan pentingnya responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan kepuasan mereka sebagai indikator utama keberhasilan pelayanan publik. Dalam konteks Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang,

upaya untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta kerja sama dengan stakeholder terkait mencerminkan komitmen untuk memberikan pengalaman terbaik kepada wisatawan. Kunjungan wisatawan dan jumlah penginapan yang memadai menunjukkan bahwa pendekatan ini telah memberikan hasil positif, namun tetap diperlukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan kepuasan pelanggan yang optimal.

Pemerintahan wirausaha

Konsep pemerintahan wirausaha menekankan pentingnya memperoleh pendapatan daripada hanya melakukan pengeluaran. Dalam konteks pariwisata Tanjungpinang, pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber seperti biaya yang dibayarkan oleh pengguna, biaya dampak (impacts fee), pendapatan dari investasi, serta insentif dan partisipasi dari pihak swasta. Pemerintah wirausaha berupaya meningkatkan pendapatan ini untuk meringankan beban pemerintah.

Tabel 1. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Tanjungpinang 2023

URAIAN	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Pertumbuhan
Pajak Hotel	5.912.702.778	7.606.565.001	28,64%
Pajak Restoran	15.978.782.692	21.166.696.905	32,46%
Pajak Hiburan	2.290.506.465	2.472.226.221	7,93%
Total	24.181.991.935	31.245.488.127	29,21%

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang

Dengan data yang menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Tanjungpinang, terutama melalui pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan, ini sejalan dengan

pernyataan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata yang menekankan pentingnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan PAD.

Pernyataan dari Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata menegaskan bahwa program pariwisata tidak hanya fokus pada layanan, tetapi juga pada kontribusi terhadap pendapatan. Dengan demikian, sektor pariwisata di Tanjungpinang diarahkan untuk menjadi pemerintahan yang menghasilkan (profit-oriented), yang berorientasi pada menciptakan keuntungan bagi daerah.

Pemerintah Antisipatif

Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengembangan pariwisata, seperti meningkatnya daya saing pariwisata tingkat regional, fasilitas dan infrastruktur wisata yang masih kurang, serta belum maksimalnya peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Menurut Hamel dan Prahalad, strategi adalah suatu pendekatan, atau pola kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dengan fokus pada beberapa area penting atau kritis. Secara sederhana, strategi adalah keputusan untuk memilih tindakan yang dapat menyelesaikan suatu masalah yang akan dihadapi (Maharani et al., 2018). Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang telah merumuskan beberapa strategi, antara lain memanfaatkan posisi strategis Tanjungpinang sebagai pasar potensial, meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung, serta melakukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran

pelaku ekonomi, organisasi, dan masyarakat.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan dan program dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Renstra ini mengidentifikasi tantangan, hambatan, peluang, serta rencana tindakan yang akan dilakukan ke depannya.

Pemerintah Desentralisasi

Desentralisasi pemerintahan mengacu pada pendistribusian wewenang dari tingkat hierarki yang lebih tinggi menuju partisipasi dan kerja tim di tingkat yang lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan menyederhanakan sistem birokrasi dan administrasi, serta mendelegasikan kepentingan pemerintah dari level atas dengan sumber daya yang ada kepada lembaga dan petugas yang berwenang di level bawah untuk mengambil keputusan yang menyelesaikan suatu masalah.

Dalam konteks Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang, desentralisasi tercermin dalam tugas pokok dinas tersebut, yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Renstra Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang juga mengacu pada Renstra Dinas Pariwisata Provinsi, menunjukkan bahwa desentralisasi merupakan kewajiban dalam menjalankan program pemerintah.

Pencapaian pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kota Tanjungpinang tidak hanya merupakan hasil kerja pemerintah kota, tetapi juga kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, swasta,

dan stakeholder lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi pemerintahan telah mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mengembangkan pariwisata daerah.

Pemerintah Berorientasi Pasar

Pemerintah berorientasi pasar adalah konsep yang menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan kondisi dan dinamika pasar dalam mengembangkan program-programnya. Mekanisme pasar dianggap sebagai cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya dengan maksimal. Dalam konteks pariwisata, hal ini berarti mengikuti tren dan kebutuhan pasar yang dapat menarik minat wisatawan. Karena pariwisata mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, seperti kerajinan, seni, makanan, transportasi, dan sebagainya, pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan lapangan kerja yang memandai (Sinuhaji et al., 2019).

Karena industri pariwisata memiliki banyak pesaing dan terus tumbuh melesat, keputusan strategi dalam mempromosikan wisata menjadi sesuatu yang sangat penting (Mardiah et al., 2019). Konsep pemerintah berorientasi pasar tercermin dalam pendekatan pembangunan pariwisata. Kepala seksi objek dan daya tarik wisata menekankan pentingnya memahami dinamika pasar dalam pembuatan program. Pengembangan pariwisata harus mengikuti tren dan kebutuhan pasar yang ada.

Untuk menentukan skala prioritas pengembangan pariwisata, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pelaku industri pariwisata dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dan

memproyeksikan potensi pertumbuhan. Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan pariwisata sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

Faktor Pendukung Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang

Pemerintah Kota Tanjungpinang mengambil langkah untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam pengembangan pariwisata, terutama dalam bidang kebudayaan. Upaya ini memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dapat membuat sektor pariwisata lebih hidup, atraktif, dan memberikan keanekaragaman pada destinasi wisata.

Dalam pengembangan kebudayaan, Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang fokus pada pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pengembangan seni dan budaya lokal, pembinaan lembaga adat, pengembangan kesenian tradisional, dan pembinaan sejarah. Melalui program-program ini, diharapkan nilai budaya lokal dapat meningkat dan memberikan kontribusi positif bagi pariwisata.

Pemasaran pariwisata Kota Tanjungpinang menekankan pentingnya memahami siapa sebenarnya segmen pasar dan bagaimana perilakunya. Pemasaran pariwisata dilakukan melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan lainnya, serta fasilitas kegiatan pemasaran wisata baik di dalam maupun luar negeri. Berbagai event dan festival pariwisata telah dilaksanakan untuk meningkatkan promosi dan

pemasaran pariwisata Kota Tanjungpinang.

Konsep ekonomi kreatif menjadi penting dalam pengembangan pariwisata, di mana setiap tahun subsektor ekonomi kreatif menjadi target pengembangan. Kota Tanjungpinang telah mengembangkan berbagai subsektor ekonomi kreatif seperti seni pertunjukkan, kuliner, fashion, musik, dan lainnya. Peningkatan jumlah subsektor ini menunjukkan perkembangan ekonomi kreatif yang positif dalam sektor pariwisata.

Anggaran adalah daftar tindakan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang telah melaksanakan kegiatan anggaran dengan baik, dengan total anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 21.267.951.773 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.188.257.977 atau sekitar 94,92%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan masyarakat langsung seperti pertunjukan, acara wisata, dan lainnya.

Faktor Penghambat Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang

Aparatur merupakan sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya dalam melayani masyarakat. Kinerja aparatur adalah hasil yang diharapkan oleh pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Menurut Widodo, kinerja didefinisikan sebagai melakukan dan menyempurnakan suatu tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, melakukan dan menyelesaikan suatu tugas harus disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan wawancara dan data sekunder yang diperoleh, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang saat ini adalah 77 orang. Komposisinya terdiri dari 44 PNS (23 laki-laki dan 21 perempuan) dan 33 non PNS (23 laki-laki dan 10 perempuan). Dilihat dari segi pendidikan, terdapat 41 pegawai berpendidikan S1, 20 orang berpendidikan SMA sederajat, 9 orang berpendidikan D3, dan 6 orang berpendidikan S2. Wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pariwisata telah senior, sehingga kurang inovasi dan kemampuan dalam penggunaan teknologi untuk pencapaian kerja.

Beberapa faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Minat investor untuk menanamkan investasi di bidang kepariwisataan di Kota Tanjungpinang masih rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya promosi dan potensi pariwisata yang belum maksimal.
2. Jiwa bisnis kepariwisataan di kalangan masyarakat masih kurang. Ini berarti bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami dan mengambil manfaat dari potensi pariwisata sebagai sumber penghasilan.
3. Kerjasama antara berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata masih kurang. Hal ini meliputi koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program pariwisata.
4. Infrastruktur, sarana prasarana wilayah, dan aksesibilitas yang belum memadai menjadi kendala dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota

Tanjungpinang. Tanpa infrastruktur yang baik, wisatawan akan merasa kurang nyaman dan tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip *reinventing government* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan pariwisata di Kota Tanjungpinang. Prinsip-prinsip seperti pemerintah katalis, milik masyarakat, kompetitif, berorientasi misi, dan berorientasi hasil terbukti dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing, dan mengarahkan pemerintah untuk lebih fokus pada hasil. Tantangan yang dihadapi termasuk rendahnya minat investor, kurangnya jiwa bisnis kepariwisataan masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Namun, dengan strategi yang tepat, termasuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan promosi yang efektif, potensi pariwisata Kota Tanjungpinang dapat dioptimalkan.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Idris, M. H., Selva, & Destari, R. (2019). Pengaruh Destinasi Pariwisata Pulau Komodo Terhadap Beberapa Aspek Pembangunan Di Kabupaten Manggarai Barat. *JIAIP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1).
- Isdarmanto. (2016). *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Pengetahuan Bartending Mixing Drinks.
- Kagungan, D. (2019). *Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata di Daerah Otonom Baru*. Pusaka

- Media.
- Lestari, N. (2023). Strategi Komunikasi Pariwisata Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Destinasi Wisata Alam Gomara Swiss Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2(2).
- M, A. P. S., Muhammadiyah, & Hamrun. (2021). Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(2).
- Maharani, M. W., Frinaldi, A., & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Efektivitas Strategi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman Terhadap Kepuasan Pengunjung Pantai Gandoriah. *JMIAP Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).
- Mardiah, Adha, R., & Kurniawan. (2019). Strategi Promosi Pariwisata Di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Promosi Pariwisata Pasca Gempa Bumi di Pulau Lombok Tahun 2018). *JIAP / Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1).
- Maulana, D. (2021). *Metode Penelitian Administrasi Teori Dan Praktik Dalam Melakukan Penelitian Administrasi*. CV. AA RIZKY.
- Mersyana, K., & Hadilinatih, B. (2023). Strategi Pengembangan Obyek Wisata Candi Prambanan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Enersia Publika*, 7(1).
- Muhammad, A., Hakim, L., & Fatmawati. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Malino di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(5).
- S, N. I., Hakim, L., & MuhYusuf. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata (Studi Objek Wisata Malino di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa). *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(4).
- Sazali, H. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Sinuhaji, V. V., Siregar, N. S. S., & Jamil, B. (2019). Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Deskriptif Kualitatif Wisata Bukit Gundaling Berastagi). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2).
- Vani, R. V., Priscilia, S. O., & Adianto. (2020). Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8(1).
- Wariski, I., & Jumiati. (2023). Strategi Pemanfaatan Media Sosial dan Influencer Oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dalam Mempromosikan Pariwisata di Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(3).
- Wibowo, I. N. A. (2019). Strategi Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2).